

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses Pengelolaan Dana Desa dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganen Tengah berjalan dengan baik Hal ini bisa dilihat dari keterbukaan dalam Musyawarah Perencanaan (Musrengbangdes) saat Penerimaan KPM (Keluarga Penerima Manfaat), yang mana dalam hal keterbukaan tersebut yaitu tokoh-tokoh desa menyampaikan semua perencanaan pada hasil rapat bagi yang menerima BLT dengan aparat desa kepada warga desa. Ketika sudah diketahui nama nama penerima BLT maka selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh Bupati Barito Kuala dan divalidasi oleh PKA dengan bukti-bukti cash maupun bukti transfer. Adapun indikator di desa tabunganen tengah, LPJ diterima oleh banyak warga mereka puas, keterbukaan secara gamblang tentang Anggaran belanja desa tabunganen tengah, diwajibkan membuat spanduk/baleho tentang relasi belanja desa tabunganen tengah, KPM (keluarga Penerima Manfaat) tidak komplek akan masalah dana desa BLT yang diterima dan KPM percaya dengan pihak desa tabunganen tengah
2. Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung tunai di Desa Tabunganen Tengah adalah masalah pembatasan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Tabunganen Tengah dari Pusat mengurangi Persenan uang dana desa dan membatasi anggaran Dana Desa BLT dan Jumlah Penerima BLT dikurangi dari sebelumnya. Sulitnya Pemerintah Desa bersama Relawan

Desa dalam menentukan kriteria yang masuk menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat, karena ditemukan data calon Penerima Bantuan BLT yang terdaftar pada bantuan PKH Lansia. Akan tetapi hal tersebut sudah diselesaikan dengan penerima memilih salah satu bantuan tersebut dan tidak boleh menerima bantuan lebih dari satu.

B. Saran-saran

Berdasarkan Data yang diperoleh serta Pembasan yang telah dilakukan beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait.

1. Maka disarankan kepada Aparat Desa untuk lebih Transparan (Terbuka) kepada masyarakat sekitar untuk tidak membuat kesalah pahaman lagi tentang penerima BLT di Tabunganen Tengah dan lebih cepat lagi dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka dilihat kembali masyarakat yang kurang paham akan Bantuan Langsung Tunai yang tidak lagi mendapatkan bantuan tersebut jangan disepelekan akan hak tersebut sebab akan membuat permasalahan atau hambatan dalam pengelolaan Dana Desa BLT, jangan diperlambat dalam memberikan paham terhadap warga masyarakat mengenai Kreteria Penerima Bantuan Langsung Tunai yaitu, Tidak mendapat PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja, masyarakat tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan, dan masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit kronis bertahun-tahun.
2. Untuk masyarakat jangan membuat omongan tidak baik akan aparat Desa atau Kepala Desa yang tidak adil dalam memilih penerima Bantuan Langsung

Tunai. Belajarlah lagi untuk menyaring perkataan yang tidak tau akan kebenarannya. Lebih aktif lagi dalam bertanya kepada aparat Desa/ Kepala Desa jika memang ada kendala atau ketidak pahaman akan bantuan yang dibreerikan oleh Pemerintah.